

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
1.1	Indikator Kinerja 1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Persentase	3,9%	-	N/A	N/A
II	Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
2.1	Indikator Kinerja 2.1 Persentase efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	80%	40%	44%	100%
2.2	Indikator Kinerja 2.2 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Persentase	80%	40%	40%	100%
2.3	Indikator Kinerja 2.3 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	Persentase	80%	40%	64%	100%

III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
3.1	Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,46	100%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
4.1	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	92%	43%	43%	100%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1:

Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu : “Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1 Peningkatan
Kontribusi Industri
Agro, Kimia,
Farmasi, dan Tekstil
terhadap PDB**

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini dicapai salah satunya melalui **peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**. Untuk mencapai target tersebut, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berfokus pada koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, khususnya Industri AKFT.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari BPS, Industri AKFT pada Sektor Industri Pengolahan mencakup 9 sub-bidang yaitu: (i) Industri Makanan dan Minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berkoordinasi erat dengan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025, Industri AKFT mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 65,60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan. Peran strategis masing-masing sub-sektor adalah (i) Industri Agro menyediakan bahan baku utama contohnya bagi industri makanan, minuman, dan tekstil (serat alam); (ii) Industri Kimia dan Farmasi, menyediakan input penting dalam proses produksi di industri agro (pupuk, pestisida), tekstil (pewarna, bahan finishing), bahan aktif obat, hingga manufaktur secara umum; dan (iii) Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagai padat karya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas yaitu penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.

Target persentase realisasi rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 adalah sebesar **3.9%**.

Pengukuran peningkatan kontribusi IAKFT melalui formula:

$$\text{Peningkatan kontribusi IAKFT terhadap PDB(\%)} = \Sigma \frac{(\text{Kontribusi IAKFT terhadap PDBt} - \text{Kontribusi IAKFT terhadap PDBt-1})}{\text{Kontribusi IAKFT terhadap PDBt-1}}$$

Kontribusi Industri AKFT merupakan kumulatif (penjumlahan) dari 9 sub-bidang industri pengolahan, yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman;
2. Industri Pengolahan Tembakau;
3. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
4. Industri Furnitur;
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
7. Industri Barang Galian bukan Logam;
8. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan
9. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Adapun besaran target kinerja pada tahun 2026 sesuai IKU 1.1. adalah Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2025 adalah sebesar **3,9%***.

Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 merupakan target tahunan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Presentase	3,9*	NA**	NA**

*target tahun 2026, **BPS belum merilis PDB TW II 2026

Persentase realisasi peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB triwulan II tahun 2026 merupakan target tahunan sehingga target belum dapat tercapai. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB triwulan II tahun 2026 sehingga realisasi pada triwulan II tahun 2026 belum dapat diperoleh. Namun, terkait rencana aksi pada triwulan II yang mendukung peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB telah terlaksana.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 5 RPJMN 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Sasaran Strategis yaitu “Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas” untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan isu dan Permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT;
2. Pengumpulan data dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT.

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB			
	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

1	Pelaksanaan kegiatan pembahasan isu dan permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing industri AKFT	Terlaksana	Telah dilaksanakan pemetaan isu dan permasalahan strategis melalui beberapa kegiatan ; - Ikut serta dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Penetapan Pembina Sektor Komoditas Pergaraman dan Komoditas Perikanan tanggal 2 April 2026 - Mengikuti Rapat Pembahasan Upaya Mitigasi Dalam Menjaga Pertumbuhan Industri Nasional, tanggal 7 Mei 2026 - Audiensi dengan Care Indonesia tanggal 18 Mei 2026 - Audiensi Program Smart Export Nusantara tanggal 15 Juni 2026. - Mengikuti Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tanggal 11 Juni 2026.
2	Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan strategis produktivitas dan daya saing industri AKFT	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait antara lain: - Ikut serta dalam Pertemuan Finalisasi Protokol dan Agenda Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-2 RI-Kazakhstan, tanggal 6 Mei 2026 - Penyampaian Masukan atas Draft Agenda dan Protokol SKB ke-2 RI-Kazakhstan 17 April 2026 - Penyampaian Masukan atas Draft Submission Indonesia terkait Investigasi Section 301 Amerika Serikat mengenai <i>Structural Excess Capacity</i> dan <i>Forced Labour</i> tanggal 6 April 2026 - Penyampaian Laporan Komisi Eropa terkait Reviu Simplifikasi EUDR, Draft Delegated Act (Annex I) serta Guidance Document dan FAQs Terbaru kepada Menko Perekonomian tanggal 29 Mei 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi Akselerasi Peningkatan Kapasitas Extended Producers Responsibility (EPR) Working Group dalam rangka memperkuat penerapan kewajiban produsen melalui sistem mandatory EPR pada tanggal 2 April 2026 ;
2. Menghadiri Rapat Koordinasi Strategis Rencana Pembentukan Steering Group Ekonomi Sirkular dalam rangka memperkuat kebijakan program prioritas ekosistem ekonomi sirkular dalam RPJMN 2025-2029 pada tanggal 19 Mei 2026;
3. Ikut serta pada Rapat Pembahasan Indonesia Country Growth and Jobs Report Policy Matrics (CGJR) dalam rangka memetakan relevant ministries/agencies yang menangani rekomendasi CGJR tanggal 25 Juni 2026;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional. Industri dalam negeri mengalami peningkatan harga bahan baku dan penurunan produksi. Hal ini menyebabkan kinerja dan utilitas industri menjadi tidak optimal.
2. Perubahan struktur organisasi di seluruh K/L beserta penyesuaian nomenklatur yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar K/L untuk beradaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo.
3. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2026, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi Industri AKFT, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka memitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, Asdep IAKFT mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

- 2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro
- 2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri
- 2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro, antara lain:

1. Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi permasalahan dalam komoditas hilirisasi industri agro
2. Penyusunan alternatif dan rekomendasi pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Undangan rapat dan daftar hadir rapat; (ii) Laporan/diskusi isu strategis dalam komoditas hilirisasi industri agro; (iii) Laporan/diskusi potensi pemenuhan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam

program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait alternatif kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Laporan terkait tindak lanjut penyusunan alternatif pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Laporan terkait Monitoring dan evaluasi konsep pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna

memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:

(i) Konsep dokumen rekomendasi terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Konsep dokumen rekomendasi pemenuhan bahan baku berbasis sumber daya alam, dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan keti}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan II sebesar 40% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	40%	44%	100%

Realisasi triwulan II secara kumulatif mencapai target sebesar 44% dengan rincian:

- Kebijakan terkait hilirisasi industri agro dengan dilakukan Diskusi dan Monitoring Industri Makanan dan Minuman di Kabupaten Subang, 30 April 2026; Monitoring dan Diskusi terkait Pengembangan Industri Makanan dan Minuman di PT Great Giant Pineapple dan PT Sari Segar Husada tanggal 25 Mei 2026; Monitoring dan Diskusi terkait Industri Kayu PT Sumber Graha Sejahtera (Sampoerna Kayoe) di Kawasan Industri Terpadu Batang tanggal 5 Juni 2026; Monitoring dan diskusi terkait Industri Hasil Tembakau di PT HM Sampoerna dan PT Bentoel Prima tanggal 25 Juni 2026;
- Penyusunan alternatif pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam antara lain Menyelenggarakan rapat tindak lanjut pembahasan pengembangan komoditas Malapari di Kabupaten Lembata pada tanggal 14 April 2026; Rapat tindak lanjut pengembangan komoditas Malapari di Kabupaten Lembata tanggal 7 Mei 2026; Rapat Pembahasan Potensi Investasi Pengembangan Komoditas Malapari di Kabupaten Lembata tanggal 19 Mei 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Hilirisasi Industri Agro			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif kebijakan terkait hilirisasi industri agro	Terlaksana	Telah dilaksanakan rangkaian Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam komoditas hilirisasi Industri Agro melalui: • Menghadiri Rapat Pembahasan Pengembangan Pertanian Berbasis AI di Kawasan Danau Toba tanggal 1 April 2026 • Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak lanjut pembahasan kebijakan tarif bea masuk almond sebagai bahan baku industri tanggal 7 April 2026 • Menghadiri Rapat Pembahasan Inisiasi Penyelidikan Anti Subsidi Produk Multi Layer Paperboard oleh DGTR India • Narasumber dalam Halaqoh Nasional “Meninjau Kebijakan Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar” tanggal 13 Mei 2026

			• Ikut serta dalam Rapat Koordinasi terkait RPMK Pencantuman peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik tanggal 18 Mei 2026 • ikut serta dalam rangkaian Rakor Sidang Satgas P3M-PPE Tindak Lanjut Aduan PT AquaFarm Indonesia tanggal 20 Mei 2026 • Audiensi dengan GAPRINDO tanggal 17 Juni 2026 • Monitoring dan diskusi terkait Industri Hasil Tembakau di PT HM Sampoerna dan PT Bentoel Prima tanggal 25 Juni 2026 • Ikut serta dalam Rapat Harmonisasi RPermenkes tentang Pencantuman peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik tanggal 22 Juni 2026 • Ikut serta dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penerapan Ketentuan EUDR Karet Alam tanggal 22 Juni 20276 • Ikut serta dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 Pembahasan Penetapan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik tanggal 24 Juni 2026 dan 30 Juni 2026 • Ikut serta dalam Rapat Penyelarasan Implementasi Program Nasional Hilirisasi Industri Sabut dan Tempurung Kelapa tanggal 29 Juni 2026.
2.	Penyusunan alternatif pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam	Terlaksana	• Terlibat dalam Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Tanaman Malapari di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 23 April 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan audiensi dengan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) tanggal 9 April 2026 untuk mendiskusikan hasil kajian DIPI terkait promosi pelaksanaan kebijakan tentang pertanian berkelanjutan yang menjadi salah satu penguatan data sektor industri agro.
2. Menyelenggarakan audiensi dengan KT&G tanggal 9 April 2026 untuk menghimpun masukan terkait pertimbangan pengaturan bahan tambahan pada produk tembakau di Indonesia.
3. Audiensi dengan PT HM Sampoerna tanggal 20 April 2026 dan Audiensi dengan GAPRINDO tanggal 17 Juni 2026 untuk menghimpun masukan pelaku usaha terkait kebijakan Industri Hasil Tembakau
4. ikut serta dalam rangkaian Rakor Sidang Satgas P3M-PPE Tindak Lanjut Aduan PT Aqua Farm Indonesia tanggal 20 Mei 2026 dalam rangka penyalarsan kebijakan pusat dan daerah terkait kuota budidaya ikan Tilapia di Danau Toba.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional. Industri dalam negeri mengalami peningkatan harga bahan baku dan penurunan produksi. Hal ini menyebabkan kinerja dan utilitas industri menjadi tidak optimal.
2. Penyesuaian terhadap struktur dan tata kelola kerja, mencakup adaptasi lingkungan kerja serta redistribusi tugas dan fungsi pegawai, merupakan implikasi langsung dari implementasi kebijakan reorganisasi kelembagaan;
3. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
4. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan dibidang Industri Agro tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan dan validasi data melalui surat permohonan data sebagai upaya menjaga keselarasan data.
2. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan K/L terkait Hilirisasi Industri Kelapa serta monitoring dan diskusi terkait tindak lanjut Pengembangan Tanaman Malapari.

2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri mencakup industri kimia hulu, industri kimia hilir, dan farmasi, dan industri pengolahan barang galian non logam, antara lain:

1. Pembahasan penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.
2. Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;

- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat; (ii) Laporan Rapat/Diskusi Isu Strategis Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (iii) Laporan Rapat/Diskusi Evaluasi Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Laporan terkait Tindak Lanjut Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Alternatif Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Rumusan RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Konsep Dokumen Rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Dokumen Penetapan Permenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan II sebesar 40% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Persentase	40	40	100

Realisasi triwulan II secara kumulatif mencapai target sebesar 40% dengan rincian:

- Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri berada di tahap 2 (40%), yakni telah dilaksanakan pembahasan penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri antara lain terkait pembahasan isu permohonan Sertifikasi SNI ubin keramik (18 Juni 2026) dan SNI ban karet (11 Juni 2026); kebijakan insentif LPG dan bahan baku plastik (11 Juni dan 29 Juni 2026).
- Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang meliputi penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hingga pada penetapannya berada di tahap 2 (40%), yakni telah dilaksanakan Pembahasan Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada tanggal 7 April, 15 April, dan 20 Mei 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pembahasan penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Terlaksana	Telah dilakukan tahap pembahasan penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri melalui : • Ikut hadir pada diskusi Rapat Tindak Lanjut Aduan PT Kairos Indonesia dan PT Berkat Artisan Konstruksi Indonesia tanggal 6 April 2026; • Menghadiri Rakor Pembahasan Permohonan Dukungan Kebijakan Tarif Bea Masuk LPG sebagai bahan baku industri tanggal 7 April 2026; 23 April 2026, 28 April 2026, 8 Mei 2026, 19 Mei 2026; • Ikut serta dalam Rapat Pembahasan Pengendalian Paparan Asbes Putih pada tanggal 8 April 2026; • Hadir pada Rapat Harmonisasi RPermenperin terkait Pemberlakuan SNI Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara Wajib tanggal 21 April 2026 dan 7 Mei 2026;

			• Menghadiri Rapat Pleno Harmonisasi RPMK Perubahan Keempat atas PMK 26/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Bea Masuk atas Barang Impor (LPG) tanggal 25 Mei 2026 dan 22 Juni 2026; • Menghadiri Diskusi Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma di Indonesia tanggal 26 Mei 2026; • Menghadiri Rapat Koordinasi (Sidang) Pembahasan Aduan PT Goodyear Indonesia terkait Sertifikat SNI tanggal 11 Juni 2026; • Menyelenggarakan Sharing Session Implementasi Standardisasi Industri (SNI Ubin Keramik) tanggal 18 Juni 2026; • Hadir pada Rakor Teknis pembahasan harga gas industri tanggal 29 Juni 2026.
2.	Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Terlaksana	Telah dilakukan tahap penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan melalui: • Menyelenggarakan Rapat Trilateral bersama Inspektorat Ekon dan Bappenas untuk membahas saran BPKP terkait Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Industri Farmasi Terintegrasi Hulu, Intermediate, dan Hilir tanggal 7 April 2026;

			• Menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Pembahasan Usulan Renaksi dan Masukan atas Draft RPermenko 15 April 2026 dan Rapat Pembahasan tindak lanjut penyusunan draft RPermenko pada tanggal 20 Mei 2026; • Melaksanakan Diskusi Sektoral dalam Rangka Penguatan Ketahanan Kesehatan dan Kemandirian Industri Nasional pada sub sektor BMHP dan Jamu pada tanggal 22 April 2026; • Tindak Lanjut Pembahasan Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan pada tanggal 29 April 2026; • Menghadiri Rapat Pembahasan Dampak Perubahan Kategori Risiko KBLI 21015 (Industri Alat Diagnosis Medis, Perban, Kasa, dan Penunjang Kesehatan Lainnya) menjadi Risiko Tinggi dalam PP 28/2025 pada tanggal 22 Juni 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. Turut berpartisipasi pada Rapat Koordinasi pembahasan kerjasama Industri Petrokimia Indonesia-Arab Saudi dan Indonesia-Kazakhstan (JCEC). Kontribusi pada pembahasan rencana kerjasama Industri Petrokimia dinilai penting karena merupakan salah satu bagian dari penguatan sektor industri kimia.
2. Ikut berkontribusi dalam memberikan usulan pada kegiatan audiensi *Indonesia Health Tourism Board*, sebagai salah satu bagian dari penguatan sektor industri farmasi khususnya sub sektor *wellnes*.
3. Menghadiri FGD Penguatan Desain Kemasan dan Pengelolaan Low Value Plastics (LVP) dalam Implementasi EPR di Indonesia, sebagai salah satu bagian dari EPR di sektor kimia.

4. Berpartisipasi pada agenda Forum Strategis Produksi Garam Farmasi dan Bahan Baku Parasetamol Dalam Negeri, sebagai salah satu bagian dari penguatan sektor industri farmasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah Mengimempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, dan rapat koordinasi sebagian besar masih menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan fasilitas *Zoom Meeting*, sebagai contoh diskusi (i) Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan pada tanggal 29 April 2026 di Ruang Rapat Kahuripan Gedung Ali Wardhana.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyesuaian terhadap harmonisasi penyusunan kebijakan yang membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan kompleksitas pembagian kewenangan antar lembaga;
2. Hambatan birokrasi lintas kementerian/lembaga seperti adanya sejumlah reorganisasi pada kementerian/lembaga terkait menyebabkan perlunya *effort* lebih dalam berkoordinasi baik untuk pengenalan maupun memperoleh pandangan berupa masukan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan;
3. Validasi Data Multi Sektoral: menyebabkan hambatan dalam mengintegrasikan data seperti data ekspor-impor (HS Code) dengan data produksi domestik seringkali terhambat karena perbedaan standar pendataan antar instansi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyikapi adanya kompleksitas pembagian kewenangan antar lembaga dengan intens berkoordinasi guna menghindari tumpang tindih regulasi.
2. Menjalin konektivitas yang lebih erat antar pemangku kepentingan guna komunikasi lintas sektor yang efektif dalam implementasi kebijakan.
3. Mengupayakan kolaborasi teknis dalam penyelarasan data guna menghindari *dispute* data termasuk melalui surat permohonan data.

2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global, antara lain:

1. Pemetaan isu strategis dan permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;
2. Evaluasi Kebijakan dan Pembahasan penyelesaian isu serta permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;
3. Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;
4. Penyusunan rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan kebijakan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;

- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Konsep Alternatif Kebijakan: Kajian Arah Pengembangan Industri TPT; (ii) Laporan Diskusi Isu Strategis Industri Alas Kaki; (iii) Laporan Diskusi Strategi Integrasi Bahan Baku Berkelanjutan (Sustainable Material) dalam Rantai Pasok Industri TPT, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Laporan terkait Implementasi Kebijakan/Program Industri TPT dan/atau Alas Kaki (i.e Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri TPT), dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;

- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Laporan terkait Evaluasi Kebijakan/Program Industri TPT dan/atau Alas Kaki; (ii) Laporan Monitoring Perkembangan Kinerja Industri Tekstil dan Alas Kaki, termasuk kesiapan Industri dalam Mengoptimalkan manfaat IEU-CEPA, dsb.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Konsep Dokumen Press Release Kegiatan terkait proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki, (ii) Konsep Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki, dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan II sebesar 40% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 64% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	%	40	64	100

Realisasi triwulan II secara kumulatif mencapai target sebesar 64% dengan rincian:

- a. Kebijakan Ekosistem Industri TPT dan Alas Kaki berada di tahapan 1, 2, 3, dan 4 (35%) yaitu dilakukan rapat koordinasi terkait Kajian Ekosistem yang telah disusun sebelumnya, khususnya mengenai Pembahasan Skema Pembiayaan Industri TPT (29 April 2026), Alur Perizinan Berusaha dan Perizinan Lingkungan khususnya Industri TPT dan Alas Kaki (13 Mei 2026).
- b. Kebijakan *Sustainable Textile* dan Budaya Lokal berada di tahapan 1 dan 3 (29%) yaitu melakukan pembahasan *deep dive* mengenai *Textile-to-Textile Recycling* (28 April 2026), serta kolaborasi strategi inisiatif bersama Rantai Tekstil Lestari (22 Juni 2026).

Pelaksanaan kedua kebijakan di atas mendukung pencapaian target Persentase efektivitas penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah

tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Peningkatan Daya Saing industri Tekstil dan Alas Kaki			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Evaluasi kebijakan dan Pembahasan penyelesaian isu serta permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA	Terlaksana	Telah dilakukan evaluasi kebijakan dan pembahasan penyelesaian isu serta permasalahan peningkatan daya saing industri TPT dan Alas Kaki meliputi: • Menyelenggarakan pertemuan dengan Prospera sebagai tindak lanjut agenda pemaparan hasil kajian Ekosistem TPT (13 April 2026) • Menghadiri seminar nasional “Manfaat I-EU CEPA dalam membangun investasi dan memperkuat rantai industri tekstil nasional” (16 April 2026) • Menyelenggarakan Rapat Strategi dan Rencana Implementasi T2T Recycling (28 April 2026) • Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Skema Pembiayaan Industri TPT (29 April 2026) • Menyelenggarakan Monitoring dan Diskusi Integrasi Aspek Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) dalam Peningkatan Daya Saing Produk Alas Kaki di Dinas Perindag Bandung (5 Mei 2026) • Menyelenggarakan <i>Sharing Session</i>: Alur Perizinan Berusaha dan Perizinan Lingkungan khususnya Industri TPT dan Alas Kaki (13 Mei 2026) • Melakukan Monitoring dan Diskusi terkait Pemanfaatan

			Serat Alam pada IKM Kain Tenun (25 Mei 2026) • Menghadiri FGD Co-Creating Indonesia's Textile Circularity Multi-Stakeholders Platform (MSP) (8 Juni 2026) • Menyelenggarakan Diskusi Lanskap Standardisasi Dan Fasilitas Perdagangan Guna Penguatan Ekosistem Industri TPT Nasional (18 Juni 2026) • Menyelenggarakan Diskusi Harmonisasi Inisiatif dalam Mendukung Transisi Keberlanjutan Sektor TPT (22 Juni 2026) • Menyelenggarakan Monitoring Dan Diskusi Terkait Pemanfaatan Serat Alam Untuk Bahan Baku Tekstil (25 Juni 2026)
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya komprehensif lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja tersebut adalah (i) Turut berpartisipasi dalam rapat pembahasan awal terkait Neraca Komoditas TPT yang diselenggarakan oleh Kemenperin, (ii) Menghadiri Sosialisasi Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil T.A 2026, serta (iii) Menghadiri *Business Matching* IKM Pakaian dan Sepatu Olahraga “Indonesia Sport And Active Wear (Isaw) Ecosystem: B2B Market Activation”.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara hybrid melalui pemanfaatan ruang rapat kantor dan Zoom Meeting. Salah satu implementasinya adalah Diskusi Harmonisasi Inisiatif dalam Mendukung Transisi Keberlanjutan Sektor TPT bersama Rantai Tekstil Lestari dan K/L terkait pada 22 Juni 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusdatin Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;

2. Pemblokiran anggaran sebesar 26% serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan di bidang TPT dan Alas Kaki tertunda/terbatas.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyelenggarakan Diskusi Pengelolaan Sisa Hasil Produksi Industri di Kawasan Berikat (1 kali). Kegiatan ini untuk menindaklanjuti arahan Laporan Menko terkait *sustainability* dan aspek lingkungan pada kajian ekosistem TPT.
2. Menyelenggarakan Monitoring dan Diskusi terkait Pengembangan Tekstil berbasis Budaya Lokal pada IKM Tenun di Makassar untuk mendukung kegiatan PN *Sustainable Textile* dan Tekstil Budaya Lokal.
3. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pusdatin Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala.
4. Terus memantau isu tata niaga impor TPT untuk menjaga ekosistem industri dalam negeri tetap kondusif dan memastikan efektivitas regulasi mendukung pertumbuhan industri lokal.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: “Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Latar Belakang

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputy Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item survei}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki target yaitu 3 dari 4 atau memuaskan. Survei ditargetkan untuk dilaksanakan pada triwulan II dan Triwulan IV berdasarkan tren tahun sebelumnya.

Hingga akhir triwulan II tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil belum dapat diukur karena survei evaluasi tahap pertama belum dilaksanakan. Adapun ringkasan pencapaian Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4*	3,46	100%

*target tahun 2026

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil realisasi pada triwulan II tahun 2026 sebesar 3,46 dari skala 4,0 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan dilaporkan hasil survei Kepuasan Layanan

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Semester I		Koordinasi, sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Semester I
--	---	--	--

Selama Triwulan II, telah dilaksanakan survei kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan total 20 responden yang berasal dari berbagai instansi yang representatif, meliputi kementerian, lembaga pemerintah, asosiasi industri, perusahaan swasta, dan akademisi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah pelaksanaan rapat untuk membahas identifikasi responden survei yang dilaksanakan di dalam kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II Tahun 2026 realisasi target masih terhambat oleh dua faktor utama: 1) belum tersedianya instrumen teknis survei (panduan dan kuesioner) dan 2) belum adanya pemetaan proporsi responden yang representatif dari unsur kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat akibat adanya restrukturisasi organisasi K/L terkait. Sebagai upaya dan rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, hasil survei akan dievaluasi sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan pelaksanaan kinerja serta pelaksanaan survei tahap kedua.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: "Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil".

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau

Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan II sebesar 43% didasarkan pada tren-tren pemenuhan target tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang terealisasi sebesar 43% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	43	43	100

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Aksi RB yang terdiri dokumen PK, Manual IKU, Rencana Aksi PK, optimalisasi implementasi arsip digital melalui SRIKANDI serta penyusunan narasi kinerja Triwulan II, dan lainnya.

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Penyusunan Revisi Renja 2027 Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan II	Terlaksana	Telah disusun laporan kinerja triwulan II 2026 pada bulan Juli 2026 Telah disusun Revisi Renja K/L TA 2027 melalui pengajuan usulan TOR dan RAB dari RO "Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penguatan Daya Saing dan Perlindungan Pasar Domestik pada Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil" pada tanggal 23 Juni 2026 Telah dilaksanakan pengelolaan dokumen kearsipan yang mendukung implementasi arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI secara berkala

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh penyusunan PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi dilaksanakan di dalam kantor, penyusunan Narasi Kinerja dilaksanakan di dalam kantor, dan penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan semua pegawai mengakses dengan cepat dokumen kearsipan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah beberapa kegiatan merupakan inisiatif baru di awal tahun sehingga masih dalam proses penjajakan di triwulan II. Selain itu, juga karena terdapat pemberlakuan efisiensi dan blokir anggaran K/L sehingga penyerapan anggaran masih kecil.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka upaya atau rekomendasi perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.